RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025

Jalan Raden Kusno Mempawah
Provinsi Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2025 dapat selesai dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dibuat sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah ini bisa disusun dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah.

Mempawah, Januari 2024

Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Mempawah

MASPUPAH, SH
NIP. 19691012 199003 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

3.2. Sasaran

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 (RKPD),
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang,
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024 serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan
3.2 Sasaran
3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Gambaran umum program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran 2023	Realisasi s.d. Desember 2023	%	Alokasi anggaran 2024
I	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	**25.617.723.470**	**24.226.244.243**	**94,57**	**28.631.027.018**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000.000**	**24.444.639**	**97,78**	**25.000.000**
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.934.400	98,69	5.000.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.413.537	96,54	2.500.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.483.770	99,35	2.500.000
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.420.027	96,80	2.500.000
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	2.403.595	96,14	2.500.000
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.789.310,00	97,89	10.000.000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.802.376.406**	**2.580.969.140**	**92,10**	**3.002.392.262**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.376.406	2.511.287.019	91,91	2.928.312.262
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	49.790.545	99,58	54.080.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	14.917.906,00	99,45	15.000.000
d	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	4.973.670	99,47	5.000.000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	18.399.900	18.262.202	99,25	**18.399.900**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.399.900	18.262.202	99,25	18.399.900
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**75.000.000**	**49.667.200**	**66,22**	**100.000.000**
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			#DIV/0!	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	75.000.000	49.667.200	66,22	100.000.000
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.703.360.000**	**1.591.371.734**	**93,43**	**1.585.400.000**
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	37.774.490	94,44	40.000.000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.000.000	88.356.610	99,28	89.000.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.235.380.000	1.134.620.535	91,84	1.142.900.000
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	84.490.975,00	99,40	85.000.000
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.980.000	58.015.200	98,36	58.500.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	168.169.000	96,10	150.000.000
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	19.944.924	99,72	20.000.000
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**107.199.400**	**77.703.000**	**72,48**	**414.237.100**
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.530.500	62.850.000	98,93	312.692.000
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.668.900	14.853.000	34,01	101.545.100
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.102.929.264**	**830.478.410**	**75,30**	**1.226.034.256**
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	588.000.000	327.691.796	55,73	588.000.000
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.929.264	502.786.614	97,64	638.034.256
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**812.263.300**	**584.979.952**	**72,02**	**1.496.958.300**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	506.963.300	297.176.102	58,62	506.963.300
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	87.295.700	87,30	100.000.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	96.412.000	96,41	799.995.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	28.890.000	96,30	30.000.000
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.300.000	75.206.150	99,88	60.000.000
9	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**18.971.195.200**	**18.468.367.966**	**97,35**	**20.762.605.200**
a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.470.345.200	18.018.051.966	97,55	20.439.905.200
b	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	448.350.000	444.150.000	99,06	270.200.000
c	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	52.500.000	6.166.000	11,74	52.500.000
II	**Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**13.876.779.874**	**12.899.959.581**	**92,96**	**13.254.312.174**
1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**872.202.824**	**669.486.715**	**76,76**	**797.597.824**
a	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	399.340.000	375.970.972	94,15	324.735.000
b	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	255.132.224	193.515.743	75,85	255.132.224
c	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	67.730.600	-	0,00	67.730.600
d	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	150.000.000	100.000.000	66,67	150.000.000
2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	100.000.000	99.650.455	99,65	**520.000.000**
a	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100.000.000	99.650.455	99,65	-
b	Pembahasan APBD	-	-	-	260.000.000
c	Pembahasan APBD Perubahan	-	-	-	260.000.000
3	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	42.834.500	40.947.200	95,59	150.000.000
a	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	42.834.500	40.947.200,00	95,59	150.000.000
4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3.752.100.000**	**3.269.138.659**	**87,13**	**3.479.100.000**
a	Pendalaman Tugas DPRD / Bimbingan Teknis DPRD	3.107.100.000	2.829.138.659	91,05	2.807.100.000
b	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	225.000.000	164.000.000	72,89	288.000.000
c	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	420.000.000	276.000.000	65,71	384.000.000
5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**2.366.805.950**	**2.278.813.990**	**96,28**	**2.366.805.950**
a	Kunjungan Kerja dalam Daerah	100.000.000	23.135.000	23,14	100.000.000
b	Pelaksanaan Reses	2.266.805.950	2.255.678.990	99,51	2.266.805.950
6	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	42.028.200	-	-	**-**
a	Penyusunan Kode Etik DPRD	42.028.200	-	-	-
7	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**190.608.400**	**165.382.095**	**86,77**	**190.608.400**
a	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	190.608.400	165.382.095	86,77	190.608.400
8	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**6.510.200.000**	**6.376.540.467**	**97,95**	**5.750.200.000**
a	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.510.200.000	6.376.540.467	97,95	5.750.200.000
	TOTAL	**39.494.503.344**	**37.126.203.824**	**94,00**	**41.885.339.192**

Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program / kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD,
2. Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi,
3. Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada,
4. Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja OPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup,
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,
3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD,
4. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan berbagai pihak ,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya,
2. Kerjasama dengan pihak *stakeholders* maupun OPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan,
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya,
4. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan berbagai pihak terutama ke BPKAD dan Bappeda,terkait dengan perencanaan dan penganggaran,
2. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan,

3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya,
4. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017.

2.2.1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.2.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih
baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada umumnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting,
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan,
3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah antara lain :

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal,
2. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
3. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD,
4. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah,
5. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD,
6. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Sekretariat DPRD dimaksudkan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurung waktu selama 1 tahun dengan tujuan yang dapat dirinciankan sbb:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2023 dan 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan pengangaran tahun 2025.
2. Mengarahkan Visi Bupati Mempawah kedalam suatu strategi pembangunan yang akan di laksanakan tahun 2025.
3. Menyusun Kebijakan pembangunan Sekretariat DPRD yang dituangkan Kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2025.
4. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan

3.2. Sasaran

Adapun sasaran penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabuapten Mempawah secara umum adalah terjabarkannya rencana strategi (rentra) Sekretariat DPRD kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 kedalam dokumen rencana tahunan yang meliputi:

1. Kerangka pembangunan dan pengangaran tahun 2025.
2. Indikasi Kegiatan pembangunan DPRD tahun 2025.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun rumusan program dan kegiatan prioritas utama tahun 2025 adalah seperti berikut :

RANCANGAN AWAL RENJA OPD
TAHUN 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**		**46.095.804.131,00**	**0,00**	**0,00**	**46.095.804.131,00**	**50.681.624.545,00**	
4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**		**46.095.804.131,00**	**0,00**	**0,00**	**46.095.804.131,00**	**50.681.624.545,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**31.522.629.720,00**	**0,00**	**0,00**	**31.522.629.720,00**	**34.674.892.692,00**	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Indikator:*	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	3.025.000,00	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	3.025.000,00	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1 Laporan)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	12.100.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indikator:*	3.302.631.488,00	0,00	0,00	3.302.631.488,00	3.632.894.637,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (31 Orang/bulan)	3.221.143.488,00	0,00	0,00	3.221.143.488,00	3.543.257.837,00	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (4 Dokumen)	59.488.000,00	0,00	0,00	59.488.000,00	65.436.800,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2 Laporan)	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	18.150.000,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (1 Laporan)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.050.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Indikator:*	20.239.890,00	0,00	0,00	20.239.890,00	22.263.879,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2 Laporan)	20.239.890,00	0,00	0,00	20.239.890,00	22.263.879,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indikator:*	136.000.000,00	0,00	0,00	136.000.000,00	149.600.000,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (1 Paket)	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	28.600.000,00	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (20 Orang)	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indikator:*	1.743.940.000,00	0,00	0,00	1.743.940.000,00	1.918.334.000,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (2 Paket)	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	48.400.000,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (10 Paket)	97.900.000,00	0,00	0,00	97.900.000,00	107.690.000,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (36 Paket)	1.257.190.000,00	0,00	0,00	1.257.190.000,00	1.382.909.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (10 Paket)	93.500.000,00	0,00	0,00	93.500.000,00	102.850.000,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (4 Dokumen)	64.350.000,00	0,00	0,00	64.350.000,00	70.785.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (26 Laporan)	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	181.500.000,00	
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1 Dokumen)	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.200.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indikator:*	455.660.810,00	0,00	0,00	455.660.810,00	501.226.891,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (219 Unit)	343.961.200,00	0,00	0,00	343.961.200,00	378.357.320,00	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (9 Unit)	111.699.610,00	0,00	0,00	111.699.610,00	122.869.571,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indikator:*	1.348.637.682,00	0,00	0,00	1.348.637.682,00	1.483.501.450,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (36 Laporan)	646.800.000,00	0,00	0,00	646.800.000,00	711.480.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (26 Laporan)	701.837.682,00	0,00	0,00	701.837.682,00	772.021.450,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indikator:*	1.646.654.130,00	0,00	0,00	1.646.654.130,00	1.811.319.543,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (3 Unit)	557.659.630,00	0,00	0,00	557.659.630,00	613.425.593,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (8 Unit)	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2 Unit)	879.994.500,00	0,00	0,00	879.994.500,00	967.993.950,00	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 Unit)	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	36.300.000,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 Unit)	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	72.600.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Indikator:*	22.838.865.720,00	0,00	0,00	22.838.865.720,00	25.122.752.292,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (35 Orang/Bulan)	22.483.895.720,00	0,00	0,00	22.483.895.720,00	24.732.285.292,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (4 Paket)	297.220.000,00	0,00	0,00	297.220.000,00	326.942.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (35 Orang)	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	63.525.000,00	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**14.573.174.411,00**	**0,00**	**0,00**	**14.573.174.411,00**	**16.006.731.853,00**	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Indikator:*	877.357.606,00	0,00	0,00	877.357.606,00	965.093.367,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (26 Dokumen)	357.208.500,00	0,00	0,00	357.208.500,00	392.929.350,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (30 Dokumen)	280.645.446,00	0,00	0,00	280.645.446,00	308.709.991,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (36 Laporan)	646.800.000,00	0,00	0,00	646.800.000,00	711.480.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (26 Laporan)	701.837.682,00	0,00	0,00	701.837.682,00	772.021.450,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indikator:*	1.646.654.130,00	0,00	0,00	1.646.654.130,00	1.811.319.543,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (3 Unit)	557.659.630,00	0,00	0,00	557.659.630,00	613.425.593,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (8 Unit)	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2 Unit)	879.994.500,00	0,00	0,00	879.994.500,00	967.993.950,00	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 Unit)	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	36.300.000,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 Unit)	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	72.600.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Indikator:*	22.838.865.720,00	0,00	0,00	22.838.865.720,00	25.122.752.292,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (35 Orang/Bulan)	22.483.895.720,00	0,00	0,00	22.483.895.720,00	24.732.285.292,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (4 Paket)	297.220.000,00	0,00	0,00	297.220.000,00	326.942.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (35 Orang)	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	63.525.000,00	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**14.573.174.411,00**	**0,00**	**0,00**	**14.573.174.411,00**	**16.006.731.853,00**	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Indikator:*	877.357.606,00	0,00	0,00	877.357.606,00	965.093.367,00	
		Sasaran:	*Target:*					
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (26 Dokumen)	357.208.500,00	0,00	0,00	357.208.500,00	392.929.350,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (30 Dokumen)	280.645.446,00	0,00	0,00	280.645.446,00	308.709.991,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (205 Dokumen)	6.325.220.000,00	0,00	0,00	6.325.220.000,00	6.957.742.000,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang subtansinya mengacu pada Rentra DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026, RKPD Kabupaten Mempawah tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026. Renja ini sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025, serta RAPBD tahun 2025.

Renja ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan dan merupakan strategis pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan agribisnis sesuai dengan Visi Bupati Mempawah dan juga renja ini dijadikan parameter untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang direncanakan telah berhasil dicapai, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasaan bagi seluruh Anggota DPRD Kabuapten Mempawah Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah ini dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan harapan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah lebih maju dan berkualitas.

Mempawah, Januari 2024

Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Mempawah

MASPUPAH, SH
NIP. 19691012 199003 2 008